

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah akses pengaduan pelayanan publik	1 Lokasi (Kab/Kota)		1 Lokasi (Kab/Kota)			April s.d. Juni 2026	Triwulan I: - Menyusun KAK kegiatan - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Triwulan II: - Melaksanakan kegiatan Akses - Menyusun laporan kegiatan Triwulan III: - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV: -	Kepala Keasistenan PVL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	283 Laporan	50	77	78	78	Desember 2026	Triwulan I: - Tindak lanjut laporan masyarakat - Permintaan keterangan kepada terlapor dan pelapor - Gelar laporan bedah laporan Triwulan II: - Tindak lanjut laporan masyarakat - permintaan keterangan kepada terlapor dan pelapor - gelar laporan - bedah laporan Triwulan III: - Tindak lanjut laporan masyarakat - permintaan keterangan kepada terlapor	Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								dan pelapor - Gelar laporan bedah laporan Triwulan IV: - Tindak lanjut laporan masyarakat - permintaan keterangan kepada terlapor dan pelapor - gelar laporan bedah laporan	
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan	1				TW I dan TW II	Triwulan I: -Menyusun KAK kegiatan -Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Triwulan II: - Tindak lanjut Inisiatif Ombudsman - permintaan keterangan	Keasistenan Pemeriksaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								kepada pihak terkait - gelar laporan - bedah laporan Triwulan III: - pelaksanaan tindakan korektif Triwulan IV: - monitoring saran Ombudsman	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	20 Pemerintah Daerah			20 Pemerintah Daerah		Juli s.d. November 2026 (Menyesuaikan Ombudsman Pusat)	Triwulan I: - Triwulan II: - Sosialisasi Penilaian OPINI Ombudsman ke Instansi yang menjadi Objek Penilaian Triwulan III: Pengambilan data dan	Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Penilaian Opini 20 K,L,P Triwulan IV: Penilaian, Verifikasi, Supervisi Opini Ombudsman terhadap 20 K,L,P	
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Januari s/d Desember 2026	Triwulan I: - pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan II: - pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan III: - pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan IV: - pengelolaan	Sekretariat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								operasional dan pemeliharaan kantor	

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

#

Adel Wahidi